

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan DIY) mempunyai luas wilayah 3.185,80 km², yang dihuni oleh 3.518.492 jiwa. Kepadatan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata 1.104 jiwa/km². Kemudian GPP per kapita dari sector pertanian adalah 15,61%, sementara itu jumlah total dari lahan sawah dan non sawah di DIY adalah sebesar 318.580 hektar. Sebagian penduduk di DIY berprofesi sebagai petani.¹

Dalam bertani, hampir semua petani menggunakan cara – cara manual dalam mengolah sawah, ladang, maupun kebunnya. Pengetahuan tentang teknologi relative masih kurang, sehingga berdampak pada hasil produksi baik kualitas maupun kuantitasnya.

Banyaknya buah – buahan import yang tersebar di segala penjuru DIY, baik di pasar swalayan maupun di pasar buah menunjukkan bahwa produksi buah local DIY belum bisa bersaing dengan buah – buahan import. Di lain pihak, di Negara lain kemampuan teknologi yang tinggi menyebabkan produksi buah – buahan mempunyai kualitas dan kuantitas tinggi dengan harga relative terjangkau.

Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang dialami oleh Negara – Negara di dunia, termasuk Indonesia sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi

¹Depdik. DIY. Profil DIY Tentang Jajin (diakses 21.10.2008):<http://www.banediduy.go.id/profil>

masyarakat DIY. Hal ini menambah berat beban Pemda DIY dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Sementara itu, sector pariwisata pun sempat mengalami kelumpuhan akibat krisis ekonomi tersebut. DIY yang mempunyai banyak obyek – oyek wisata yang menarik belum mampu secara optimal mempromosikan pariwisatanya ke Negara – Negara lain. Hal ini berakibat pada kedudukan DIY sebagai kota pariwisata kedua setelah Bali belum mampu menyumbang banyak devisa bagi Negara dikarenakan jumlah pendatang hanya mencapai 800.168 orang (local = 96.777 orang dan asing = 703.391 orang), sementara infrastrukturnya yaitu hotel terdiri dari 997 bangunan dengan jumlah 13.742 kamar.²

Untuk memecahkan masalah tersebut, maka Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat dengan Pemda) DIY perlu banyak belajar dari pengalaman propinsi – propinsi lain sehingga dapat dipelajari ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai strategi yang sesuai untuk diterapkan di DIY.

Pemda DIY dalam misinya antara lain menyebutkan³ :

1. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas (Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar local, regional dan global dengan produk Agrobisnis dan Agroindustri yang kompetitif.

² Danar, D. dan N. (2001). Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata MICE (Meeting Incentive, Conference and exhibition) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi di Pulau Jawa .

Untuk mewujudkan misinya tersebut, terdapat banyak upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY diantaranya bekerjasama dengan propinsi lain di Indonesia, bekerjasama dengan propinsi lain di luar negeri namun hasilnya belum memuaskan.

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap propinsi / kabupaten / kota memiliki peluang untuk bekerjasama dengan propinsi / kabupaten / kota di Negara lain dengan berlandaskan pada Undang – Undang Otonomi Daerah. Hal ini sekaligus memberi kesempatan kepada propinsi untuk dapat berperan sebagai actor baru dalam hubungan internasional.

Dengan ditetapkannya UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 42 dan pasal 195 memberi peluang kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada pasal 195 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan saling menguntungkan”. Hal ini berarti bahwa kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar

Sister province adalah hubungan kerjasama propinsi bersaudara yang dilaksanakan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri.⁴ Salah satu kerjasama *sister province* yang dilakukan oleh Propinsi DIY adalah dengan Pemerintah Propinsi Chiang Mai Kerajaan Thailand.

Sesungguhnya, terdapat banyak propinsi lain di luar negeri yang memiliki kualitas unggul dan tak kalah dengan Chiang Mai untuk dapat dilakukan kerjasama, namun pada akhirnya DIY tetap memilih Chiang Mai sebagai partner untuk dapat bekerjasama dengan bentuk *sister province*.

Pembentukan *sister province* antara DIY dengan Thailand, yang merupakan Negara tetangga dan sama – sama Negara anggota ASEAN tentunya mempunyai keistimewaan lebih dibandingkan dengan kerjasama *sister city/sister province* dengan Negara – Negara yang secara geografis terletak jauh dari Indonesia.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu : Mengapa Propinsi DIY menjalin kerjasama *sister province* dengan Propinsi Chiang Mai Thailand?

C. Kerangka Pemikiran / Teori Yang Digunakan

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka digunakan konsep dan teori sebagai berikut:

⁴ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*.(Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001), 110.

Hubungan Transnasional dan Kerjasama Internasional

Transnasional didefinisikan oleh Richard Falk sebagai perpindahan barang, informasi, dan gagasan melintas batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan langsung oleh aktor – aktor pemerintah.⁵ Konsep ini jelas mengurangi makna kedaulatan, batas wilayah nasional dan interaksi pemerintah dalam sistem dunia karena setiap negara begitu mudah disusupi dan terbuka bagi pengaruh dari luar, akibatnya politik dalam negeri tidak bisa dibedakan dari politik internasional. Hal ini melibatkan partisipasi besar – besaran dari berbagai jenis aktor non negara, terutama organisasi non pemerintah dalam negeri maupun internasional.⁶

Salah satu ciri pokok dari hubungan transnasional adalah adanya berbagai jenis interaksi yang mem-bay-pass pemerintah negara – negara dan yang secara langsung mempengaruhi lingkungan dalam negeri pemerintah – pemerintah nasional itu. Adapun aktor non negara dalam hubungan internasional ini dapat berwujud kelompok suku, etnis/separatis di dalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan MNC bahkan bagian dari birokrasi pemerintah pusat. Berbagai aktor non negara tersebut bisa mempengaruhi politik dunia secara langsung, tidak hanya melalui pengaruh atas negara bangsa. Setiap aktor, baik negara, organisasi internasional maupun organisasi non pemerintah memiliki kelemahan dan membutuhkan peranan aktor – aktor lain. Hal ini membuat semua aktor dapat dengan mudah mempengaruhi aktor lain.⁷ Untuk

⁵ Richard Falk, "A Study of Furure World", dalam Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi: Model Hubungan State Centric dan Hubungan Transnasional*. (Jakarta: LP3ES, 1990), 231.

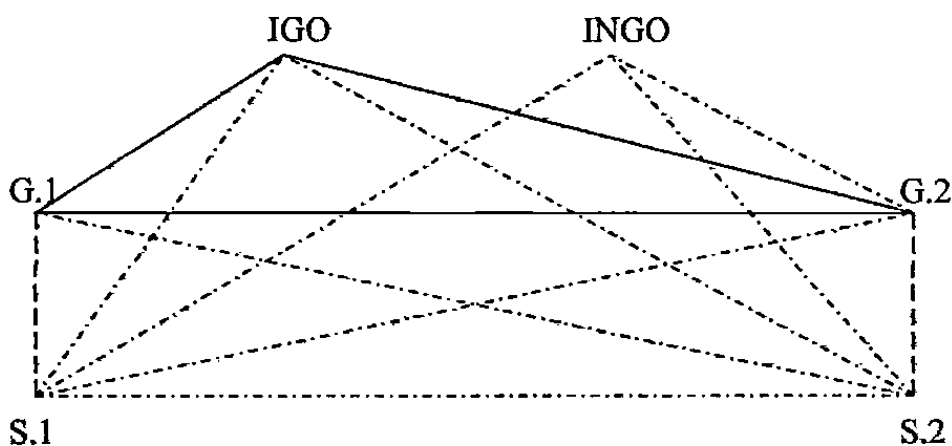
⁶ Mohtar Mas' oed, *Ibid*, 231.

⁷ *Ibid*

menguraikan definisi tersebut, sebelumnya kita dapat menelaah bagan yang menggambarkan pola interaksi hubungan transnasional dan politik antar negara.

Gambar I. 1

Interaksi Transnasional dan Politik Antarnegara⁸



Keterangan :

- = politik antar negara klasik
- = politik dalam negeri
- = interaksi transnasional
- G = pemerintah
- S = masyarakat
- IGO = organisasi antar pemerintah
- INGO = organisasi antar non pemerintah

Dari gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa hubungan internasional tidak hanya terjadi dalam lingkup negara saja (garis lurus) namun juga dari organisasi non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan masyarakat pun dapat juga berinteraksi dengan masyarakat negara lain (garis putus titik). Organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat negara lain tanpa melalui perantara pemerintah pusat.

⁸ Adaptasi dari R.O. Keohane dan J.S. Nye, "Transnasional Relations and World Politics", (dalam *Makna Mendasar Ilmu Hubungan Internasional: Dimensi dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990))

Sebagai contohnya, perusahaan Saha Siam Farm yang bergerak dalam bidang pertanian dan mempunyai berbagai produk unggulan seperti jahe sushi, buah – buahan tropis, cocktail buah tropis kaleng, nanas kaleng, jagung kaleng. Kemudian, Saha Farm Corporation yang bergerak di bidang bahan makanan beku dan mempunyai produk unggulan seperti daging asap, yakitori, bola daging ayam telah banyak diekspor ke luar negeri termasuk ke DIY. Sementara itu, berbagai buah dan makanan asli dari Indonesia juga telah didatangkan ke Chiang Mai dalam rangka perayaan nasional negara Thailand. Kerjasama ekspor – impor tersebut dapat langsung dilakukan oleh masyarakat kedua negara tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

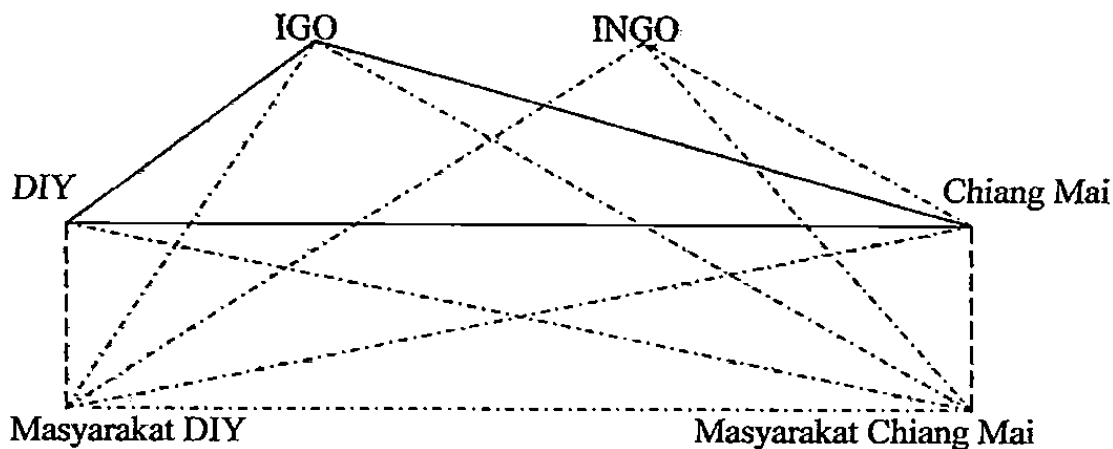
Namun dalam teori hubungan transnasional tersebut, perlu lebih ditegaskan lagi bahwa yang berperan dalam hubungan internasional adalah tidak hanya *people to people* saja, namun suatu wilayah propinsi / kabupaten / kota termasuk dalam hal ini DIY dan Chiang Mai juga dapat digolongkan sebagai aktor non negara yang mempunyai wewenang penuh untuk dapat bekerjasama melintasi batas wilayah negara. Pada konteks *sister province* ini, kedua propinsi termasuk aktor bebas yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain, terlepas dari partisipasi pemerintah pusat. Hal ini diperkuat dengan adanya ekspor impor antara masyarakat keduanya seperti yang telah disebutkan di atas.

Untuk kerjasama *sister province* antara DIY dan Chiang Mai, maka

bentuk kerjasamanya dapat terlihat sebagai berikut :

Gambar I. 2

Pola Kerjasama Sister Province antara DIY dengan Chiang Mai



Keterangan :

- = politik antar pemerintah daerah
- - - - - = politik dalam negeri
- = interaksi transnasional
- S = masyarakat
- IGO = organisasi antar pemerintah
- INGO = organisasi antar non pemerintah

Untuk dapat mencapai visi misi setiap daerah, tentunya memerlukan bantuan dari pihak lain yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Namun, sebelum ada otonomi daerah, setiap daerah yang ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar negeri sering terkendala akibat tidak mempunyai kewenangan untuk berhubungan / bekerjasama dengan negara lain karena hubungan luar negeri masih menjadi wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, kemudian pemerintah pusat mengeluarkan Undang - undang yang berisi tentang otonomi daerah yang di dalamnya memuat kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri / kerjasama luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada sehingga dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta bertujuan untuk dapat mencapai visi misi daerah tersebut

Dengan adanya otonomi daerah, aktor hubungan internasional tidak hanya negara namun juga Propinsi dan Kabupaten / Kota. Hal ini mempunyai implikasi terhadap pola hubungan internasional yaitu Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Luar Negeri perlu menempatkan personelnya di setiap Propinsi. Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat membentuk bidang / bagian yang mengurus hubungan / kerjasama luar negeri secara otonom.

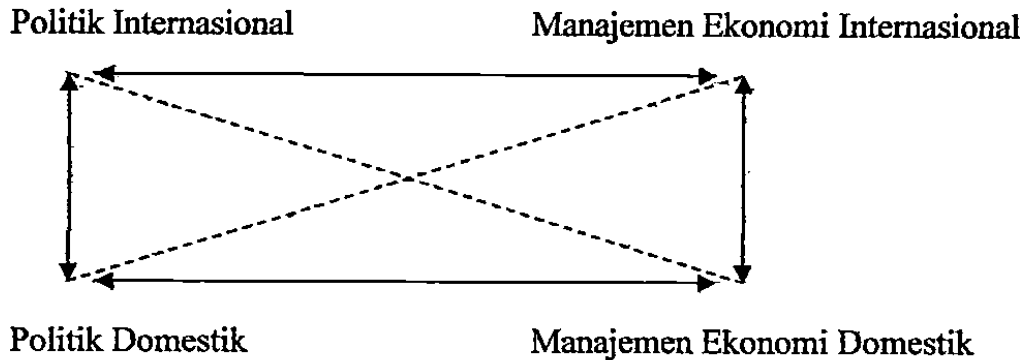
Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti perintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri. Sedangkan otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁹ Meskipun sebagian wewenang pusat dilimpahkan ke daerah namun kedaulatan, politik luar negeri, mata uang, hukum dan Undang – Undang tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Namun demikian, meskipun politik luar negeri masih menjadi wilayah Pemerintah Pusat, adanya tekanan diplomasi dan arah kebijakan luar negeri akan diikuti oleh unsur – unsur kepentingan nasional dan daerah, dimana hubungan ekonomi internasional menjadi semakin peka terhadap ekonomi dalam negeri. Seperti yang dikatakan oleh pendukung hubungan transnasionalis, yang menekankan bahwa hubungan politik internasional dan ekonomi internasional akan mempengaruhi politik dan ekonomi dalam negeri dan sebaliknya.¹⁰ Hal ini ditunjukkan dalam bagan sebagai berikut:

⁹ Sarundajang, "Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah," dalam Nugroho D Riant, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Burekri* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 46

Gambar I.3

Kaitan – Kaitan Transnasional: Politik dan Ekonomi¹¹



Dalam konteks *sister province* ini Pemerintah Pusat hanya berfungsi sebagai fasilitator, karena politik luar negeri menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Apabila Pemerintah Daerah dalam hal ini DIY memerlukan kerjasama luar negeri maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan terhadap Menteri Luar Negeri melalui Direktur Perjanjian Ekososbud agar Gubernur DIY mempunyai full power dalam penandatanganan MoU. Selain itu juga diperlukan arahan dari Departemen Dalam Negeri yaitu melalui Kepala Pusat Administrasi Kerjasama dalam penandatanganan MoU.¹²

Hal ini sesuai dengan pola interaksi hubungan transnasional yang tidak hanya mengakui negara sebagai satu – satunya aktor hubungan internasional tetapi juga aktor – aktor lain non negara, termasuk organisasi pemerintah / non pemerintah dalam negeri maupun internasional yang fokus perhatiannya bukan semata – mata pada masalah militer dan keamanan, tetapi juga kepada isu ekonomi.

¹¹ Susan Strange, dikutip dari Bruce Russett dan Harvey Starr, "World Politics," dalam Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 233.

¹² Departemen Dalam Negeri, Biro Kerjasama Luar Negeri DIY, *Prosedur Kerjasama Kota*

Dengan demikian, adanya otonomi daerah telah memungkinkan suatu daerah Propinsi atau Kabupaten atau Kota untuk dapat mengadakan hubungan luar negeri yang pada dasarnya sesuai dengan kerangka hubungan transnasional. Gagasan *sister province* yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai gagasan yang melewati lintas batas negara tanpa dikendalikan oleh pusat, sehingga *sister province* dapat dikategorikan dalam kerangka hubungan transnasional tersebut.

Dalam sistem internasional, khususnya dalam kehidupan bernegara, tentunya sebuah negara tidak dapat terlepas dari negara lain. Kepentingan dasar negara untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain adalah merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditawar - tawar. Dalam memenuhi kebutuhannya, setiap negara tentu harus mengadakan hubungan dengan negara lainnya yang diwujudkan dalam suatu bentuk kerjasama.

Menurut K.J. Holsti, pendefinisian Kerjasama Internasional adalah sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, berbagai perjanjian yang memuaskan semua pihak ini yang disebut dengan kerjasama.¹³

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Sebagian besar transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama.¹⁴

Kerjasama dapat terjalin dalam berbagai bidang yaitu bidang ekonomi, sosial budaya, politik, maupun pertahanan keamanan.

¹³ K.J. Holsti, *Politik Internasional Studi Analisis HI*. (Jakarta: Erlangga, 1998), 89.

¹⁴ K.J. Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, edisi keempat, jilid kedua, alih bahasa: M. Tahin Agha, (Jakarta: Erlangga, 1998), 210.

Dalam dunia yang semakin maju akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, maka semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi setiap negara. Hal ini menyebabkan peningkatan interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa. Di sisi lain terjadi pula peningkatan hubungan internasional yang diwarnai dengan bentuk kerjasama dalam berbagai bidang guna mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Demikian juga bagi negara Indonesia, kerjasama dengan negara lain sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan sekaligus memenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya kiprah Indonesia di dunia internasional, baik oleh pemerintah maupun aktor – aktor non pemerintah, sehingga membawa implikasi perlu ditingkatkannya peran dari masing – masing pelaku hubungan internasional tersebut.

Propinsi DIY dalam hal ini sebagai salah satu propinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diberi kewenangan untuk dapat bekerja sama dengan daerah lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, tentunya menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik – baiknya, agar dapat memecahkan permasalahan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Salah satu kerjasama antara Propinsi DIY dengan propinsi lain di luar negeri diantaranya adalah dengan Propinsi Chiang Mai Thailand. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama sister province. Kerjasama ini didasari oleh berbagai kepentingan bersama diantara keduanya yaitu antara lain dalam bidang pariwisata, diharapkan dapat meningkatkan promosi pariwisata diantara keduanya, dalam bidang industri dapat memberi peluang kepada investor swasta di Chiang

Mai untuk memasarkan produknya dan menarik masuknya investor tersebut ke DIY, dalam bidang pertanian dapat dilakukan kerjasama dan alih teknologi, dalam bidang perdagangan dapat meningkatkan ekspor impor antar masyarakat keduanya sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian kedua belah pihak yang semakin membaik.

Selain itu, setelah melihat dan mempelajari Chiang Mai secara lebih lanjut, terdapat kesamaan karakteristik antara DIY dengan Chiang Mai dalam banyak hal termasuk potensi dan kebudayaan, sebagai pusat pariwisata dan pendidikan maka hal tersebut menjadi poin tambahan yang sangat penting bagi pelaksanaan hubungan kerjasama selanjutnya.

Pada akhirnya, Pemerintah Propinsi DIY meyakini bahwa apabila dilakukan kerjasama dengan Chiang Mai secara lanjut tentunya dapat memajukan tingkat kesejahteraan dan perekonomian DIY, terutama dalam bidang pertanian dan pariwisata karena kerjasama sebelumnya yang telah ditangani bersama pun juga sangat menguntungkan. Untuk selanjutnya DIY memutuskan untuk mengusulkan suatu bentuk kerjasama *sister province* agar lebih mempererat hubungan kedua belah pihak dan untuk menindak lanjuti kerjasama sebelumnya yang telah dikukuhkan dalam LoI pada tahun 2005 yang lalu. Mengingat bahwa Chiang Mai sebagai partner yang tepat untuk memajukan dan mengembangkan DIY secara lebih baik, maka diharapkan dari kerjasama ini dapat bermanfaat untuk masyarakat kedua belah pihak.

Berbagai bidang yang dikerjasamakan yakni antara lain dalam bidang budaya dan seni, pertanian, pariwisata, perdagangan dan industri.¹⁵ Selain itu, para delegasi dari kedua belah pihak pun didorong untuk saling mengunjungi sebagai sarana untuk lebih mempererat hubungan keduanya.¹⁶ Sebagai propinsi yang mempunyai teknologi pertanian yang canggih dan kemampuan untuk menarik jumlah wisatawan dengan kuantitas yang tinggi, Chiang Mai diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pertanian dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat DIY.

Terdapatnya berbagai kepentingan bersama dan ditambah dengan kesamaan karakteristik antara kedua propinsi, semakin melengkapi unsur – unsur yang menjadi syarat untuk dilakukannya kerjasama internasional. Penandatanganan LoI dan MoU dapat digolongkan sebagai hasil dari proses pembahasan masalah dan perundingan antara kedua belah pihak yang diakhiri dengan nota kesepakatan perjanjian. Dengan demikian, kerjasama *sister province* termasuk dalam konteks kerjasama internasional karena sesuai dengan konsep kerjasama internasional yang telah dikemukakan di atas.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengajukan hipotesis mengenai alasan yang mendasari propinsi DIY menjalin kerjasama *sister province* dengan propinsi Chiang Mai adalah:

¹⁵ Departemen Dalam Negeri, Biro Kerjasama Luar Negeri DIY, *LoI Kerjasama DIY – Chiang Mai*

¹⁶ Departemen Dalam Negeri, Biro Kerjasama Luar Negeri DIY, *MoU Kerjasama DIY – Chiang*

1. Kerjasama sister province dengan Chiang Mai merupakan salah satu upaya Pemda DIY dalam mewujudkan misinya.
2. Adanya kepentingan bersama dan kesamaan karakteristik antara DIY dan Chiang Mai menjadi alasan terjalinnya kerjasama sister province antara Propinsi DIY dan Propinsi Chiang Mai.

E. Tujuan Penulisan

Sasaran yang hendak menjadi tujuan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Membahas secara ilmiah kerjasama *sister province* antara Propinsi DIY dengan Chiang Mai.
- b. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan penulis.
- c. Menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti.
- d. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tetap terpancang pada permasalahan yang diteliti maka penulis menentukan jangkauan penelitian diambil dari tahun 2002 sebagai

tahap penjajagan sebelum adanya kesepakatan penandatanganan LoI hingga tahun 2008 sebagai tahun terakhir diperolehnya data yaitu tahun 2008.

G. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah teknik pengumpulan data yang bersifat primer yaitu melalui wawancara langsung dengan staff Biro kerjasama Luar Negeri. Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder melalui studi pustaka dan melalui berbagai situs internet, laporan, koran, serta informasi data dari dinas / instansi dan badan usaha terkait berupa peraturan perundang – undangan. Penulis memperoleh data – data mengenai program kerjasama dari Pemda DIY khususnya Biro Kerjasama Luar Negeri. Sementara itu profil Chiang Mai dan DIY penulis dapatkan melalui jurnal – jurnal dari Biro Kerjasama, buku – buku, dan juga situs internet. Dengan menggunakan data seperti ini akan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran / teori yang digunakan, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan dan kerangka skripsi.

BAB II Bab ini membahas tentang otonomi daerah dan berbagai

bagi program kerjasama daerah dengan luar negeri serta misi DIY yang menjadi alasan DIY menjalin kerjasama dengan Chiang Mai.

BAB III Bab ini menjelaskan tentang program kerjasama, prosedur kerjasama, serta tahapan – tahapan dalam pembentukan *sister province* antara DIY dengan Chiang Mai.

BAB IV Bab ini menerangkan tentang kesamaan karakteristik dan kepentingan bersama yang menjadi salah satu alasan Propinsi DIY menjalin kerjasama dengan Chiang Mai. Selain itu juga diuraikan sekilas profil kedua propinsi sekaligus potensi – potensi yang dimiliki untuk menunjang kerjasama tersebut.

BAB V Kesimpulan.

I. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Kerangka Pemikiran / Teori Yang Digunakan
- D. Hipotesis
- E. Tujuan Penulisan
- F. Jangkauan Penelitian

G. Metode Penelitian dan Data

H. Sistematika Penulisan

I. Kerangka Skripsi

**BAB II KERJASAMA SISTER PROVINCE SEBAGAI
SALAH SATU UPAYA DIY MEWUJUDKAN
MISINYA DENGAN PRASYARAT ADANYA
OTONOMI DAERAH**

A. Landasan Kerjasama Daerah Dengan Luar Negeri

B. Otonomi Daerah Sebagai Dasar Hukum Bagi DIY
Menjalin Kerjasama Dengan Chiang Mai

C. Kerjasama Sister Province Sebagai Salah Satu Upaya
DIY Mewujudkan Misinya

**BAB III KERJASAMA BILATERAL MELALUI PROGRAM
SISTER PROVINCE ANTARA DIY DENGAN
CHIANG MAI**

A. Program Kerjasama Sister Province

B. Prosedur Kerjasama Sister Province

C. Proses Terbentuknya Sister Province Antara DIY
Dengan Chiang Mai

**BAB IV KESAMAAN KARAKTERISTIK DAN
KEPENTINGAN BERSAMA SEBAGAI SALAH
SATU ALASAN TERJALINNYA KERJASAMA
SISTER PROVINCE**

- A. Kesamaan Karakteristik Antara Propinsi DIY dan Propinsi Chiang Mai
- B. Kepentingan Bersama Antara Propinsi DIY Dengan Propinsi Chiang Mai

BAB V KESIMPULAN